



Radikalisme Dan Sekularisme Sebagai Ancaman Kehidupan Beragama, Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara

Faishal Busthomi¹ 

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Article Info:

Accepted: 10 Oktober 2024; Approve: 20 Oktober 2024; Published: 28 Oktober 2024

ABSTRAK

Tujuan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi sehingga terwujud tatanan saling menghormati dan menghargai. Idealisme tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Fenomena radikalisme dan sekularisme Islam di Indonesia yang sudah menampakkan dirinya secara masif. Berbagai agenda sudah mereka bangun untuk disebarluaskan melalui berbagai cara. Sebuah ideologi, sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk mengikat masyarakatnya agar bisa hidup bersama dalam naungan satu ideologi. Begitu juga dengan Indonesia yang para founding fathersnya sudah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, maka secara otomatis Pancasila sebagai ideologi ini wajib dipatuhi dan diikuti oleh seluruh anak bangsa. Ideologi Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dengan penuh rasa toleran. Karena adanya banyak jenis agama, suku, ras dan aliran, namun pada hakekatnya satu jua, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Radikalisme; Sekularisme; Beragama; Bermasyarakat; Berbangsa; Bernegara.

ABSTRACT

The purpose of religion, society, nation, and state is to humanize humans in a humane way so that an order of mutual respect and appreciation is realized. This idealism has not fully run according to expectations. The phenomenon of Islamic radicalism and secularism in Indonesia has shown itself massively. They have built various agendas to be disseminated through various means. An ideology is very much needed by a nation to bind its people so that they can live together under the auspices of one ideology. Likewise with Indonesia, whose founding fathers have established Pancasila as the ideology of the Indonesian nation, then automatically Pancasila as this ideology must be obeyed and followed by all children of the nation. The ideology of Pancasila with the principle of Bhinneka Tunggal Ika teaches us to always live with a sense of tolerance. Because there are many types of religions, tribes, races and sects, but in essence one, namely one nation, the Indonesian nation.

Keyword: Radicalism; Secularism; Religion; Society; Nation; State.

Corresponding Author: Faishal Busthomi

Email: faishal_busthomi@iainponorogo.ac.id

1. Pendahuluan

Di awal abad ke-21, pasca runtuhnya Orde Baru, kesempatan politik semakin terbuka yang dimotori oleh gerakan reformasi Indonesia. Hal tersebut juga mendorong gerakan mobilisasi massa secara transparan dalam ruang publik. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai macam gerakan sosial secara massif di Indonesia. Perubahan iklim



politik pada Orde Reformasi tersebut, berpengaruh juga terhadap perkembangan kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat dengan semakin menguatnya identitas dan gerakan kelompok keagamaan di luar mainstream kelompok keagamaan. Dalam perkembangan gerakan sosial keagamaan tersebut, terdapat tiga aspek yang menonjol, yaitu pertama, aspek yang didorong oleh orientasi politis, kedua orientasi keagamaan yang kuat, dan ketiga orientasi kebangkitan kultural rakyat Indonesia. Adapun dalam pendekatannya, kaum agamawan dan gerakan keagamaan, menurut AS Hikam, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan negara dan pendekatan masyarakat (Usman et al., 2014).

Terdapat beberapa faktor yang secara bersamaan menggerakkan orang untuk membangun sebuah bangsa yang bersatu. Faktor-faktor tersebut tidak terbatas pada adanya kesamaan pengalaman masa lalu seperti ras, bahasa, dan agama. Selain itu, yang penting pula perannya adalah faktor kondisi sosial yang dirasakan bersama, kemudian membentuk ikatan soliditas dan menyatukan sebuah kelompok masyarakat menjadi suatu kesatuan yang sadar-diri. Di antara kondisi yang dialami bersama itu, pengalaman paling menyakitkan adalah yang paling kuat pengaruhnya. Dalam kasus di Indonesia yang kaitannya dengan gerakan keagamaan misalnya, tidak mengherankan jika pengalaman menyakitkan berupa kemiskinan, ketidakadilan, dan ketakutan akan hilangnya identitas keagamaan, yang disebabkan oleh kebijakan pelaksana negara, menjadi pendorong paling kuat bagi tumbuhnya gerakan-gerakan sosial keagamaan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai gerakan anti kebijakan negara tentang agama telah berlangsung selama beberapa abad yang lalu. Akan tetapi, gerakan-gerakan sosial dapat terorganisasikan dengan baik baru benar-benar berkembang pada dekade pertama abad ke-20 (Johns, 1987). Meskipun amat beragam dilihat dari asal-usul dan tujuan khusus pembentukannya, gerakan-gerakan sosial tersebut hendak mencapai tujuan umum yang sama, yaitu menentang berbagai kebijakan dan sistem penyelenggaraan negara. Beberapa di antara gerakan sosial tersebut tidak bersifat politis, sebagian lagi di antaranya lebih tegas menyatakan sifat politisnya, sedangkan yang lainnya lebih bercorak gerakan keagamaan dan kultural. Dalam hal gerakan keagamaan, dapat dibuktikan bahwa gerakan keagamaan pernah ada di Indonesia khususnya di Jawa dalam abad ke-19 dan ke-20. Berbagai macam pergolakan keagamaan pun sering dijumpai berkaitan dengan

perubahan sosial dengan hal-hal yang menyertainya, termasuk di dalamnya keresahan sosial, mobilitas, dan pertikaian.

Dalam praktik kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Dalam hal ini, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang besar peranannya dan memiliki jamaah dengan jumlah besar, serta menjadi ideologi paling berpengaruh bagi masyarakat Muslim di Indonesia hingga saat ini. Selain organisasi tersebut, terdapat pula organisasi yang menghimpun tokoh agama dan ulama yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi keagamaan yang ketiga ini sifatnya struktural dan di bawah kendali negara. Inilah yang kemudian dijadikan patokan dan sebagai alat legitimasi untuk mengatur kehidupan dan paham keagamaan di Indonesia (Usman et al., 2014).

Pengaruh ketiga organisasi keagamaan tersebut cukup besar baik sebagai norma dan etika dalam aktivitas keagamaan maupun dalam pengaruhnya terhadap kebijakan negara mengenai agama. Ketiga organisasi tersebut dikategorikan sebagai Islam mainstream khususnya di Indonesia, sementara kelompok yang berbeda secara ideologi dan aktivitas keagamaan dikategorikan sebagai Islam non-mainstream. Islam non-mainstream adalah kelompok Islam, tetapi tidak sesuai praktik keislaman yang populer atau berbeda ideologi dari ketiga organisasi sosial keagamaan; NU dan Muhammadiyah atau di luar ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berbicara tentang "gerakan non-mainstream" berarti bertolak dari suatu pengertian tentang mainstream (aliran induk) itu sendiri; karena gerakan non-mainstream adalah gerakan yang memisahkan diri mainstream atau arus utama yang berlaku. Tanpa tolok ukur mainstream, istilah nonmainstream tidak dapat didefinisikan. Untuk menentukan mana gerakan yang bercorak non-mainstream, terlebih dahulu harus mendefinisikan mainstream yang mapan. Dalam kasus umat Islam Indonesia masa kini, keagamaan mainstream boleh dianggap diwakili oleh badan-badan ulama yang berwibawa seperti terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah, Syuriah NU, dan sebagainya. Apabila mencari kriteria yang objektif untuk mendefinisikan dan memahami gerakan non-mainstream, sebaiknya terlebih dahulu diambil jarak dari perdebatan mengenai kebenaran dan kesesatan, hal ini untuk menghindari stigma negatif terhadap paham keagamaan non-mainstream. Gerakan non-mainstream tentu saja menganggap dirinya lebih benar daripada lawannya; dan biasanya justru merasa lebih yakin akan

kebenaran paham atau pendiriannya. Oleh karena itu, kriteria yang digunakan adalah kriteria sosiologis, bukan teologis. Gerakan non-mainstream yang tipikal adalah kelompok atau gerakan yang sengaja memisahkan diri dari "mainstream" umat, cenderung eksklusif dan seringkali kritis terhadap para ulama yang mapan.

Salah satu tantangan dakwah yang merupakan PR bersama bagi umat Islam adalah paham sekularisme. Dalam tulisan yang singkat ini penulis hanya membatasi sekularisme dalam bidang pendidikan saja. Dengan membaca tulisan ini diharapkan masyarakat akan menyadari tentang dampak buruk sekularisme dalam dunia pendidikan (Bafadhol, 2015).

Sekularisme identik dengan *laa diniyyah* (tidak terikat ad-dien), yaitu sebuah gagasan yang menyeru untuk menegakkan kehidupan di atas landasan ilmu dan akal serta memperhatikan kemaslahatan tanpa terikat dengan agama. Makna yang telah disepakati dari kata sekularisme adalah memisahkan agama dari negara serta kehidupan bermasyarakat dan mempersempit ruang bagi agama sehingga hanya tersimpan pada jiwa setiap individu, tidak boleh melampaui hubungan khusus antara dia dengan Rabbnya. Jika agama hendak diekspresikan, maka hanya boleh pada ritual-ritual peribadatan dan hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan kematian saja. Sekularisme sejalan dengan agama Kristen dalam hal memisahkan antara agama dan negara, ya"ni wewenang negara adalah urusan kaisar sedangkan wewenang gereja adalah urusan Allah. Hal ini nampak jelas dari sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada al-Masih, "Berikanlah hak kaisar untuk kaisar dan hak Allah untuk Allah." Adapun dalam Islam, dikotomi semacam ini tidak dikenal karena seorang muslim seluruhnya milik Allah, dan kehidupan seluruhnya milik Allah. Allah berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya:

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-An'am: 162).

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau library research. Kajian pustaka adalah pendekatan penelitian yang menggunakan jurnal, buku, dan majalah yang relevan dengan topik penelitian sebagai data utama untuk merujuk dan mengacu sebagai sumber referensi. Penelitian ini berfokus pada deskriptif, dengan penekanan pada buku dan studi pustaka yang tidak memerlukan penelitian lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Radikalisme

a) Pengertian

Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian (Madjis, 1995). Sementara yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Harun, 1995). Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Tetapi memang tidak bisa dibantah bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham keagamaannya secara kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum radikalisme Islam.

Istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme, karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang interpretable. Dalam perspektif Barat, fundamentalisme berarti paham orang-orang kaku ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam perspektif Islam, fundamentalisme berarti tajdid (pembaruan) berdasarkan pesan moral Al-Quran dan Sunnah. Dalam tradisi pemikiran teologi keagamaan, fundamentalisme merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah (Imarah, 1999). Fundamentalisme juga berarti anti-pembaratan (westernisme). Terkadang fundamentalisme diartikan sebagai radikalisme dan terorisme disebabkan gerakan fundamentalisme memiliki implikasi politik yang membahayakan negara-negara industri di Barat.

Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu, secara historis sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh pers Barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya tidak jarang image-image negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat perlu dicurigai.

b) Faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme

Pertama, radikalisme Islam itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosial-politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik dan ekonomi. Dalam hal ini kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama kaum radikal mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggagalkan kekuatan untuk mencapai tujuan “mulia” dari politiknya.

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut) walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif.

Ketiga, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai anti tesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim. Peradaban barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia. Barat telah dengan sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan Muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat, dengan sekularismenya, sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam, juga dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam.

Keempat, faktor ideologis anti westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syari'at Islam. Sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syarri'at Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban.

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintahan di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat (Khamid, 2016).

c) Cara menghadapi paham radikalisme

Perlu diadakan pembinaan yang baik melalui pendidikan untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme. Banyak penduduk Indonesia yang berusia muda dan bila tidak dilakukan pembinaan yang positif bisa membahayakan. Faktor yang bisa menimbulkan radikalisme yaitu emosi keagamaan atau solidaritas keagamaan dan berbahaya bila melekat pada orang yang pengetahuan agamanya dangkal.

Radikalisme bisa terjadi pada semua agama, namun selama ini yang dikenal sebagai radikal adalah umat Islam. Kita harus selalu waspada terhadap:

- 1) ajakan-ajakan jihad yang diartikan dengan perang,
- 2) kehidupan yang lebih baik,
- 3) ajakan yang mengharuskan menggunakan cadar.
- 4) Cara merekrut anggota mendekati kelompok atau organisasi yang se-aliran dan yang berekonomi lemah atau yang pendidikan agamanya lemah,
- 5) mencari orang dikampung yang militan dan mengisahkan perjuangan dan mengiming imingi jihad.

Disini kita semua harus waspada. Kita harus jaga diri kita, anak-anak kita atau teman-teman kita dari ideologi radikal.

d) Pencegahan radikalisme

Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham radikal teroris.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah yang radikal menjadi tidak radikal. Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralsasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.

Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.

Menurut Azyumardi, deradikalisasi dilakukan dengan enam pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan (Azra, 2012). Adapun penjelasan pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, yaitu; 1) pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, serta 2) pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokersa, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, redukasi dilakukan dengan

memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad melainkan identik dengan aksi terorisme.

- 3) Resosialisasi adalah program yang dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana dan narapidana teroris dalam bersosialisasi, berbaur dan menyatu dengan masyarakat. Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti publik lecture, workshop, dan lainnya. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.
- 4) Pembinaan wawasan kebangsaan adalah memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan, dan kebangsaan Indonesia.
- 5) Pembinaan keagamaan adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan keagamaan mengacu pada moderasi ideologi, yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran.
- 6) Pendekatan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan deradikalisasi. Dunia usaha mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, dunia usaha juga memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat lebih kreatif dan mandiri.

b. Sekularisme

a) Pengertian

Sekuler, berasal dari kata latin *seculum* yang berarti "masa" karena itu sekular berarti "berorientasi pada masa sekarang" Sekularisme adalah sebuah doktrin, semangat, atau kesadaran yang menjunjung tinggi prinsip kekinian mengenai ide, sikap, keyakinan, serta kepentingan individu yang mendapat momentumnya di abad pertengahan ketika munculnya penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyudutkan pihak gereja katolik dan memicu bangkitnya gereja reformis yang dipimpin oleh Martin Luter (Rasyidi, 1972).

Sekularisme, dalam karakteristiknya seperti yang ada di Barat, adalah formulasi ide yang menegaskan bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda dan terpisah. Pengertian ini berdasarkan pada pengakuan bahwa "Agama merupakan sebuah keyakinan yang dipegang teguh manusia meskipun dalam pandangan yang berbeda." Orang bisa saja berbeda tentang agama tetapi mereka bisa menjadi warga dari sebuah negara yang sama, dan mereka bisa seperti ini dengan lebih nyaman apabila negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Oleh karena itu, sekularisme tidak hanya sekedar konsep politik, tetapi juga sebuah filsafat hidup dan citacitanya adalah kemajuan dalam kehidupan manusia di dunia ini, tanpa memandang agama, aliran, maupun warna kulit seseorang (Basyir, 1988). Sedangkan sekularisasi adalah transformasi dari seseorang, lembaga, atau hal-hal yang bersifat spritual ke dalam keduniaan. Hal ini menarik perhatian sebagaian orang karena adanya anggapan yang keliru bahwa materi lebih memberi pemenuhan kehidupan, harga diri dan prestise ketimbang menjadi seorang idealis sebagaimana yang ada pada doktrin-doktrin keagamaan (Yunus, 1985).

Sebagai sebuah proses sosial, yang terjadi dibawah kontrol seseorang, sekularisasi berusaha menyingkirkan perang otoritas keagamaan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebuah masyarakat menjadi sekular ketika agama termarjinalkan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam kaitan ini, sekularis adalah orang yang percaya bahwa persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan harus terbebas dari semua aturan agama dan dogma.

Jadi secara umum sekularisme adalah paham yang berpandangan bahwa agama tidak berurusan dengan persoalan ke duniaan yaitu persoalan politik dan sosial budaya. Agama cukup bergelut dengan ritual keagamaan an sich. Dengan mendasarkan standar etika dan tingkah laku pada referensi kehidupan sekarang dan kesejahteraan sosial tanpa merujuk pada agama. Atas dasar itu islam menentang sekularisasi karena islam tidak memiliki potensi sama sekali terjadinya proses sekularisasi. Pernyataan ini didukung oleh para ilmuwan islam yang tergabung di dalamnya para teolog (mutakallim), mufassirin, muhaddisin, filosof islam, sejarawan dan lain-lain, walaupun mereka cenderung (fokus) pada bidang-bidang tertentu dalam kajian agama islam.

b) Konsep sekularisasi

Dalam dunia politik, sekularisasi diistilahkan dengan desacralization of politics, yang memiliki makna bahwa politik tidaklah sakral. Jadi unsur-unsur rohani dan agama harus disingkirkan dari politik. Hal ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik

dan sosial yang juga akan membenarkan munculnya proses sejarah. Segala macam kaitan antara kuasa politik dan agama dalam masyarakat apapun tidak boleh berlaku karena dalam Masyarakat sekuler, tidak seorang pun memerintah atas otoritas “kuasa suci”. Sekularisasi tidak hanya terjadi di dalam dunia politik, ia juga terjadi dalam kehidupan, yaitu dengan penyingkiran nilai-nilai agama atau dekonsentrasi nilai-nilai. Mereka menyatakan bahwa kebenaran adalah relatif. Tidak ada nilai yang mutlak. Sistem nilai manusia sekuler harus dikosongkan dari nilai-nilai agama. Manusia sekuler percaya bahwa “wahyu langit” dapat dipahami karena hal itu terjadi dalam sejarah yang dibentuk oleh kondisi sosial dan politik tertentu. Sekularisasi memberikan tanggung jawab kepada otoritas manusia untuk membina sistem nilai. Sekularisasi akan menjadikan sejarah dan masa depan manusia cukup terbuka untuk menerima perubahan dan kemajuan karena manusia akan bebas membuat perubahan serta pro aktif dalam proses evolusi.

Dengan konsep ini manusia sekuler terkesan tidak mengakui kebenaran Islam yang mutlak. Mereka akan menolak konsep-konsep Islam karena semua hal dianggap relatif. Makna kebenaran bagi mereka adalah “segala yang berlaku dimasyarakat” dan bukan yang dikonsepsikan oleh Al-Qur’an.

c. Problematika sekularisme di berbagai aspek kehidupan

a) Bidang pendidikan

Pertama, membuka pintu bagi tumbuhnya paham atheisme. Ini dikarenakan paham sekularisme tidak menanamkan keyakinan terhadap Allah Sang Pencipta dalam jiwa para siswa (Bafadhil, 2017). Kedua, membuka pintu lebar-lebar bagi kerusakan akhlak. Sekularisme tidak memandang tabu atau aib pergaulan bebas antara siswa-siswi selama mereka sudah dewasa dan dilakukan dengan pilihan mereka sendiri. Ketiga, terputusnya hubungan sejarah dengan para pendahulu kaum Muslimin yang luhur. Keempat, Terbaikannya pendidikan rohani. Hal ini dikarenakan sekularisme melupakan karakter manusia yang terdiri dari unsur fisik dan psikis, atau jasmani dan rohani. Kelima, Mengaburkan keimanan terhadap perkara-perkara yang ghaib. Dalam sistem sekularisme, fenomena-fenomena alam dikaji dan dianalisa secara eksperimental dan terlepas dari kekuasaan Ilahi. Di samping itu juga meremehkan perkara-perkara ghaib seperti keimanan kepada hari akhir, pahala, dosa dan sebagainya. Akibatnya, sebagai hasil dari pendidikan yang sekular itu tumbuhlah suatu masyarakat yang tujuan hidupnya adalah kesenangan dunia semata. Keenam, Pergeseran nilai-nilai dan norma-norma. Pendidikan yang sekular

berdampak menghapus nilai-nilai dan norma-norma Islami dari jiwa para siswa, lalu mengantinya dengan nilai-nilai produk Barat. Ketujuh, Pendidikan yang dipisahkan dari nuansa religius hanya akan melahirkan berbagai kepincangan dan problem. Ia mengkritik para pendidik yang merasa dirinya terpelajar kemudian merasa tidak membutuhkan nilai-nilai agama, dan mencari sumber baru yang dianggapnya dapat menolong.

b) Bidang Politik

Dalam kondisi politik yang kuat dan dibatasi oleh negara, justru dinamika intelektual Islam mengalami perkembangan yang begitu pesat. Batasan-batasan politik yang demikian kuat menjadikan kalangan intelektual Islam melakukan aktivitas- aktivitas intelektual yang berimplikasi besar secara politik, dengan melampaui batasan-batasan yang dibangun oleh struktur politik yang ada. Modernisme Islam yang ada awalnya muncul sebagai suatu gerakan pembaharuan dan purifikasi Islam, kemudian kehilangan kreativitas intelektualnya ketika terlibat dan masuk ke dalam wilayah politik praktis melalui instrumen partai politik (Pangestutiani, 20200).

4. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa radikalisme di Indonesia muncul seiring dengan perubahan tatanan sosial dan politik, terutama setelah kedatangan pemuda-pemuda Arab dari Hadramaut, Yaman, yang membawa ideologi baru ke tanah air. Upaya yang tepat untuk mengatasi radikalisme di Indonesia meliputi peran pemerintah, peran institusi keagamaan dan pendidikan, peran masyarakat sipil, penanganan isu-isu kritis, program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi, serta pendekatan berbasis kesejahteraan.

Perbedaan adalah sebuah rahmah, kondisi yang seharusnya disikapi dengan bijak dan penuh toleransi. Sikap frontal hanya akan menodai nilai-nilai kebaikan dalam perbedaan tersebut. Kebijakan dalam menghadapi perbedaan menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap substansi ajaran agama yang menjunjung nilai perdamaian. Pada akhirnya, umat beragama akan menyadari bahwa sikap radikal hanya pantas diaplikasikan dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain.

Sekularisme sebagai sistem yang berasal dari Barat tidak dapat dipungkiri telah memengaruhi pola pendidikan di negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Sejarah munculnya sekularisme di Eropa berawal dari pertentangan antara sains dan agama

(Kristen). Namun, dalam Islam, tidak ada pertentangan antara sains dan agama; sebaliknya, Islam justru mendorong kemajuan sains. Oleh karena itu, berkembangnya sekularisme di Eropa memiliki dasar yang kuat dan logis, sedangkan di negeri-negeri Islam tidak ada alasan untuk menerapkan sistem tersebut. Dampak buruk sekularisme dalam pendidikan antara lain adalah terbukanya pintu bagi paham atheisme, melemahnya nilai-nilai keimanan, dan merebaknya kerusakan akhlak. Oleh sebab itu, para pendidik Muslim perlu merancang sistem pendidikan Islami yang mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan, akhlak dan keterampilan, serta kecerdasan dan ketakwaan.

Dengan demikian, tindakan radikalisme dan pengaruh sekularisme yang terus mengguncang Indonesia merupakan masalah serius yang berpotensi merusak citra Islam itu sendiri. Situasi ini menjadi tanggung jawab bersama para pemimpin agama Islam dan pemimpin negara untuk bersatu, merapatkan barisan, dan bekerja sama dalam membangun serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

- Al-Juhani, Mani'. (1418 H). *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzhab wa al-Ahzab al-Mu'ashirah*, Jilid 2. Riyadh: Dar an-Nadwah al-'Alamiyyah.
- Azra, A. (2011). Akar radikalisme keagamaan: Peran aparat negara, pemimpin agama dan guru untuk kerukunan umat beragama. Makalah dalam diskusi "Memperkuat Toleransi Melalui Sekolah," The Habibie Center, Hotel Aston, Bogor, 14.
- Bafadhol, I. (2017). Sekularisme dan pengaruhnya dalam dunia pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(7).
- Basyir, A. A. (1988). *Ijtihad dalam sorotan*. Mizan.
- Imarah, Muhammad. (1999). *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Johns, Anthony H. (1987). "Indonesia: Islam and Cultural Pluralism." Dalam John L. Esposito (Ed.), *Islam in Asia: Religion, Politics and Society* (hlm. 203-213). Oxford: Oxford University Press.
- Khamid, Nur. (2016). Bahaya radikalisme terhadap NKRI. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 123-152.
- Madjid, Nurcholish. (1995). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.

- Pangestutiani, Y. (2020). Sekularisme. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 6(2), 191-209.
- Rasyidi, M. (1972). *Koreksi terhadap sekularisasi Nur Kholis Majid*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sutrisno. (1990). *Metodologi Research III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). *Radikalisme agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Watt, William Montgomery. (1988). *Islamic Fundamentalism and Modernity*. London: T.J. Press (Padstow) Ltd.

